

Profile

Organisasi

Yayasan Penabulu

Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004 dengan bentuk badan hukum yayasan. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia.

Pada periode pertama 2002–2009, Penabulu menemukan momentumnya yang pertama, dengan fokus penguatan pada aspek pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. PSAK 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 yang dikeluarkan oleh IAI tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang mulai diberlakukan efektif sejak tahun buku 2000 (kemudian direvisi pada tahun 2011) menjadi latar belakang utama kerja penguatan Penabulu pada periode tersebut. Berbasis standar pelaporan keuangan tersebut, tuntutan akuntabilitas organisasi nirlaba mulai disuarakan dengan kuat terutama oleh lembaga donor, penyumbang sumber daya terbesar organisasi masyarakat sipil Indonesia. Periode tersebut ditutup dengan pengembangan komunitas keuangan LSM, ruang berbagi pengetahuan dan literasi dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi yang kala itu didorong berkembangnya era web interaktif 2.0, web yang memungkinkan adanya interaksi online antar anggota komunitas.

Pengalaman Penabulu sebelumnya dalam menguatkan kapasitas pengelolaan keuangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, membawa Penabulu bersentuhan dengan elemen pengelolaan organisasi yang lain. Penabulu kemudian sampai pada kesimpulan dan

keyakinan baru, bahwa transparansi, akuntabilitas serta keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya bisa dibangun di atas ketangguhan pilar pengelolaan keuangan belaka.

Maka pada periode kedua 2010–2014, Penabulu mencoba mengembangkan fokus kerja tambahan dengan titik tekan baru pada aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (perencanaan-pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan pengelolaan data-informasi-pengetahuan. Selain aspek manajemen tersebut, Penabulu juga mulai mengembangkan kompetensi dan portofolio pada upaya penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial.

Periode pertumbuhan kedua ini bersamaan dengan setengah- perjalanan transformasi besar organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Selain perubahan eksternal yang mendasar seperti perkembangan dahsyat era teknologi digital, pergeseran pendulum kekuatan ekonomi dunia, serta laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri; berubahnya isu dukungan dan pola pendanaan lembaga donor merupakan pemicu utama proses transformasi tersebut. Pada periode transformasi ini, penguatan kelembagaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendapati dukungan puncaknya.

Isu akuntabilitas sebagai sasaran penguatan di periode awal telah dikuatkan dengan isu profesionalitas (efektifitas dan efisiensi kinerja) dan juga isu keberlanjutan (atau ancaman ketidakberlanjutan) organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Momentum tersebut memungkinkan Penabulu untuk mengembangkan unit-unit layanan utama dan pendukung, melakukan kreasi atas produk-produk hasil pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama ini, melakukan kerja kolaboratif bersama sekian banyak mitra strategis, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pada saat yang sama, mencoba mendiversifikasi sumber-sumber dukungan pendanaan organisasi.

Masih dalam kerangka tuntutan transformasi organisasi masyarakat sipil Indonesia, lahirlah Penabulu Alliance pada periode pertumbuhan kedua tersebut; aliansi strategis pengembangan gagasan, inisiatif, dan kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil Indonesia dalambentuk ‘keterikatan yang lepas’, dimana setiap elemen didalamnya memiliki kebebasan gerak dalam pencapaian tujuannya masing-masing, namun tetap terikat secara kolektif pada visi bersama dalam jangka panjang, yaitu: keberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil di Indonesia.

Penabulu memaknai rekayasa institusi ini sebagai sebuah upaya membangun keberlanjutan tujuan organisasi di masa depan; fokus pada kemandirian unit masing-masing dalam pelayanan, dan mencoba bertahan hidup dari keunggulan layanan dan produk dari masing-masing unit itu sendiri, tidak lagi harus bergantung pada dukungan lembaga donor.

Strategi dan proses pencapaian tatanan akhir periode pertumbuhan kedua Penabulu masih akan terus berlangsung dan masih perlu diuji serta dimodifikasi. Bersamaan dengan itu, Penabulu kini memasuki periode pertumbuhan ketiga sejak awal tahun 2015.

Pada periode baru ini, Penabulu menyadari bahwa definisi ‘masyarakat sipil’ perlu dimaknai ulang. Bukankah:

komunitas pengelola sampah, kelompok-kelompok relawan, jurnalis independen, asosiasi profesi, usahawan sosial, kelompok-kelompok perempuan dan juga komunitas-komunitas difabel atau inisiatif kolektif lainnya yang menyodorkan solusi alternatif dan bahkan sekitar 74 ribu desa yang kini memperoleh sumber daya tambahan; seluruhnya merupakan elemen masa kini dari masyarakat sipil Indonesia? Di masa depan, Penabulu meyakini bahwa peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan akan semakin tak tergantikan sebagai penjaga keseimbangan akhir di antara aktor pembangunan lainnya: pemerintah dan sektor bisnis. Namun keberadaan masyarakat sipil sendiri sesungguhnya terancam oleh beberapa masalah internal, antara lain kesenjangan sumber daya pendukung kerja jangka panjang, lemahnya kapasitas kelembagaan dan buruknya konsolidasi kekuatan di masing-masing sektor isu.

Penabulu kini mendorong dirinya untuk mengambil peran sebagai ‘civil society resource organization’. Sebagai organisasi sumber daya bagi masyarakat sipil di Indonesia, Penabulu akan berusaha sebaik-baiknya memobilisasi, mengelola dan menyalurkan sumber daya dalam bentuk apapun demi mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia. Penabulu sedapat mungkin akan mengkonversi energi yang diperoleh bagi upaya-upaya penguatan, pemberdayaan dan penjaminan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Mengubah energi menjadi ruang tumbuh bersama, ruang konsolidasi kekuatan ide, gagasan dan keberpihakan masyarakat sipil di Indonesia, menjadi pemicu dan pemacu tata kelola pembangunan negeri ini yang lebih baik di masa depan.

*Pantai Oesina, Kupang Barat
YAPEKA
Dokumentasi Program*

VISI

Masyarakat sipil Indonesia yang berdaya

MISI

Mendorong keberdayaan dan keberlanjutan posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi; mobilisasi, pengelolaan dan penyaluran sumber daya; pengembangan kemitraan setara antar sektor pembangunan serta penggalangan partisipasi dan keterlibatan publik seluas-luasnya.

Badan Pelaksana



PENABULU MANAJEMEN HIBAH (Penabulu Grant Management) adalah salah satu dari empat Badan Eksekutif di bawah Yayasan Penabulu yang menjalankan fungsi penggalangan sumber dana, penyaluran dan pengelolaan dana hibah, serta memfasilitasi advokasi kebijakan publik secara berjejaring.

Disahkan secara resmi pada 24 Oktober 2018 berdasarkan akta notaris No. 31 oleh Kokoh Henry, SH, MKn, notaris di Jakarta. Penabulu Manajemen Hibah juga mengemban amanat untuk memberikan pelatihan, asistensi teknis dan peningkatan kapasitas organisasi kepada mitra untuk mendukung skema hibah lain.



PENABULU JEJARING IMPLEMENTASI (Penabulu Implementing Network) adalah salah satu dari empat Badan Eksekutif di bawah Yayasan Penabulu yang dimandatkan untuk melanjutkan cikal bakal peran Penabulu sebelumnya dalam mengimplementasikan program pada tingkat tapak dengan memaksimalkan kontribusi dari kantor cabang dan bekerja sama dengan jejaring mitra aliansi; dengan tetap menekankan pada kepemilikan dan penguatan kapasitas lokal pada setiap wilayah kerja.

Secara resmi disahkan pada 24 Oktober 2018 berdasarkan akta notaris No. 30 oleh Kokoh Henry, SH, MKn, notaris di Jakarta, hingga saat ini Penabulu Jejaring Implementasi telah bermitra dengan ratusan OMS di seluruh Indonesia.



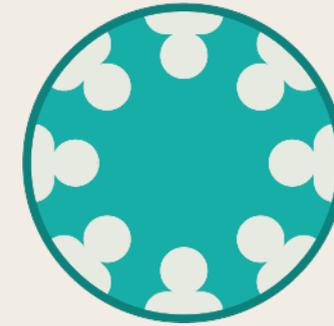
PENABULU INSTITUT RISET (Penabulu Research Institute) adalah salah satu dari empat Badan Eksekutif di bawah Yayasan Penabulu yang secara resmi disahkan pada 24 Oktober 2018 berdasarkan akta notaris No. 30 oleh Kokoh Henry, SH, MKn, notaris di Jakarta.

Dimandatkan untuk mengelola data, informasi dan pengetahuan yang dilahirkan dan dikelola oleh Penabulu. Badan pelaksana ini bergerak dengan mengembangkan Kajian strategis, riset aksi dan advokasi berbasis data yang mendukung pencapaian tujuan organisasi; yang pada saat yang sama menjadi ujung tombak bagi pengembangan kemitraan yang efektif dengan lembaga



PENABULU TANGGAP BENCANA (Penabulu Disaster Response) merupakan Badan Eksekutif termuda Yayasan Penabulu. Dibentuk dengan mandat menyatukan sumber daya organisasi dalam tanggap bencana di Indonesia, Badan Pelaksana yang dikukuhkan secara resmi pada 12 November 2019 berdasarkan akta notaris No. 11 oleh Kokoh Henry, SH, MKn ini bertugas untuk menggalang sumber daya para pihak, menyalurkan bantuan logistik kemanusiaan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan darurat dan pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak sesegera mungkin sesuai dengan sistem pasar lokal.

Isu Strategis



Pembangunan Inklusif

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Penabulu meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian; sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan;

seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).



Pasar Berkelanjutan

Pendekatan rantai nilai (VCD) selama ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat miskin dan peluang ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh sistem pasar dinamis di mana mereka berada. Pendekatan ini bekerja dalam kerangka kerja intervensi yang mencoba mempengaruhi struktur dan sistem, serta pola relasi atau hubungan di dalam rantai nilai untuk memungkinkan usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produk dan proses mereka, dan dengan demikian berkontribusi lebih dan mendapatkan manfaat lebih dari rantai nilai yang telah diintervensi tersebut.

Penabulu meyakini bahwa selain perbaikan dan penyempurnaan rantai nilai komoditas, intervensi pasar secara komprehensif kini perlu juga dilakukan. Pendekatan M4P (Making Market Work for The Poor) merupakan sebuah pendekatan untuk mengembangkan sistem pasar yang lebih menguntungkan orang miskin, menawarkan peningkatan kapasitas dan tingkat kehidupan mereka, dengan cara mengidentifikasi solusi bagi kendala sistemik dan mendorong perbaikan sistem pasar dalam skala besar dan memastikan perubahan yang terjadi bersifat permanen dan berkelanjutan.

Pendekatan M4P akan dilakukan terhadap satu sistem pasar utuh, yaitu pada rantai pasar inti komoditas, dan kedua cakupan lensa tambahan yaitu lensa fungsi pendukung, dan lensa aturan-aturan formal dan informal yang mempengaruhi bagaimana sebuah sistem

pasar bekerja. Fungsi pendukung dapat mencakup saluran informasi, akses permodalan, jalur distribusi dan penggudangan, dan fungsi lainnya yang seringkali menjadi kendala/permasalahan mendasar bagi bekerjanya sistem pasar bagi kelompok miskin.

Program akan melakukan kreasi dan inovasi terbaik bagi penemuan solusi fasilitasi atas permasalahan sistemik yang ditemui di masing-masing fokus komoditas/sektor, sesuai dengan karakteristik, skala dan ruang lingkup khusus masing-masing kawasan sasaran program; antara lain melalui pendampingan pengembangan rencana bisnis berbasis riset, penguatan kapasitas manajemen unit usaha, tata kelola koperasi, layanan pengembangan bisnis, dan inisiasi pendirian BDS lokal.



Kemitraan Pemerintah-Swasta -Komunitas

Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan. Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya.

Pendekatan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat (Public- Private-Community Partnership – PPCP) merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha/ layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusifitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak; sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan dan teknologi baru.

Penabulu meyakini bahwa model kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat akan menjadi pendekatan terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Program akan mendorong formulasi dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan, kesepakatan dan dukungan bersama bagi rencana pembangunan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Pada saat yang bersamaan. Penabulu juga akan mendorong praktek-praktek pengelolaan terbaik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Model kemitraan pembangunan tersebut akan dikembangkan pada skala pengelolaan yang paling kecil, mulai dari skala desa hingga tingkat kabupaten.

Secara kongkret, program akan mendorong terbangunnya dialog antara masing-masing pihak, melalui riset dan kajian, seminar/lokakarya, forum dialog, implementasi model kerjasama di tingkat lokal dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan-kesepakatan operasional multipihak dalam jangka panjang.



Lingkungan dan Perubahan Iklim

Indonesia adalah mega-biodiversity country nomor dua di dunia setelah Brazil. Indonesia juga memiliki tidak kurang dari 90 tipe ekosistem. Meskipun hanya merupakan 1,3% luas daratan di dunia, Indonesia memiliki 25% spesies ikan di dunia, 17% spesies burung, 16% spesies reptil dan amfibi, 12% spesies mamalia dan 10% spesies tumbuhan bunga. Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau, memiliki hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil dengan luasan sekitar 114 juta hektar dan mencakup lebih dari setengah hutan tropis yang kini dipunyai Asia.

Pola pembangunan ekonomi tradisional akan selalu memberikan dampak berat bagi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya bagi kehidupan manusia kini dan masa datang. Ekonomi Hijau yang kini didorongkan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Ekonomi Hijau adalah konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengelolaan sumber daya dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial.

Penabulu meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Jelas bahwa pembangunan rendah emisi ataupun ekonomi hijau masih memerlukan dorongan kuat dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pendapatan harus didorong oleh investasi yang mengurangi emisi dan polusi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Program mendorong penguatan kelembagaan organisasi masyarakat sipil, koperasi dan kelompok usaha kecil menengah dalam manajemen dan kemampuan teknis pelestarian serta tata kelola usahanya, penguatan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan perangkat dan panduan, memfasilitasi dialog kebijakan pada level nasional dan lokal serta pendokumentasian praktik terbaik dan petikan pembelajaran.



Pemberdayaan Desa

Program Desa Lestari merupakan strategi komprehensif bagi pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari. Program ini menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat dan berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

Pengembangan model Desa Lestari memadukan 3 siklus secara simultan, yaitu siklus pengorganisasian masyarakat yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun; siklus tata pemerintahan desa dan siklus keuangan desa yang keduanya berbasis periode tahunan.

Penabulu meyakini bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi terwujudnya desa yang lestari. Hanya desa, yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, yang akan lestari.

Tujuan khusus dari program ini adalah untuk mendorong partisipasi, kemandirian dan keswadayaan masyarakat desa dalam tata kelola kelembagaan dan pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan desa, penguatan ekonomi masyarakat desa, pembentukan dan pengelolaan Koperasi dan BUMDesa, dan pemanfaatan

secara berkelanjutan sumber daya lingkungan alam yang dimiliki desa.

Program akan memberikan fokus intervensi pada pelatihan dan pendampingan pengorganisasian masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, pengembangan perangkat dan alat bantu pendukung, pengembangan literasi terbuka, input teknologi dan pengembangan model-model terbaik bagi tujuan replikasi implementasi program sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kearifan lokal masing-masing desa sasaran program.



Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Penabulu meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola

layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan itu sendiri.



Akuntabilitas Publik

Fenomena pengaturan diri atau swatata teramati pada hampir semua aspek kehidupan sehari-hari, mulai sistem fisik, kimia, biologi, psikologi, budaya dan juga sistem pemerintahan. Sistem swatata didefinisikan sebagai kemunculan spontan struktur- struktur baru dan bentuk-bentuk perilaku baru dalam sistem- sistem terbuka yang jauh dari kesetimbangan, yang dicirikan oleh putaran-putaran umpan balik internal dan nonlinier.

Perubahan secara acak mendorong terjadinya swatata, memungkinkan eksplorasi terhadap ruang-keadaan yang baru. Pada sistem swatata, kita berhadapan dengan sistem kompleks yang berperilaku sederhana. Ketika negara tidak (belum) sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakatnya, maka sistem swatata-lah yang sesungguhnya mewujud selama ini.

Penabulu meyakini bahwa pemahaman terhadap sistem swatata tersebut menjadi ruang subur bagi penguatan akuntabilitas publik. Salah satu elemen penting dalam penguatan akuntabilitas publik adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang relevan juga akan meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak berarti banyak tanpa jaminan keterbukaan informasi publik

yang memberikan ruang keikutsertaan warga dalam tata kelola pemerintahan (social participation), pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga (social responsibility), dukungan warga terhadap jalannya pemerintah (social support), dan kontrol dan pengawasan warga terhadap tindakan-tindakan pemerintah (social control).

Program didedikasikan untuk pengembangan upaya kolaborasi dalam penciptaan kondisi terbaik bagi pembangunan daerah pada tingkat kabupaten/kota hingga tingkatan desa dengan mendorong pemerintah untuk semakin terbuka dalam menyajikan informasi publik bagi warga, menjembatani atau membangun model saluran informasi dan dialog itu sendiri, serta meningkatkan daya pemahaman kritis dan kapasitas analisa warga atas sajian informasi publik tersebut.

Program akan melakukan berbagai kegiatan kajian dan penelitian terutama bagi pengenalan potensi pembangunan daerah; fasilitasi proses-proses perencanaan dan pengembangan kebijakan tingkat lokal, pengembangan literasi terbuka serta forum dialog yang setara antar pemerintah dan warga, dan terutama dengan kolaborasi pengembangan platform antarmuka yang mewadahi arus keterbukaan dan dialog atas informasi publik dengan maksimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang akan terus semakin berkembang.



Penguatan Kelembagaan

Program penguatan kelembagaan publik dan lembaga yang bekerja bagi kepentingan publik menjadi fokus kerja sejak awal berdirinya Penabulu dengan titik tekan utama diberikan kepada penguatan kapasitas organisasi nirlaba/organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Penabulu berkesimpulan dan meyakini bahwa transparansi, akuntabilitas serta keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya bisa dibangun di atas ketangguhan pilar pengelolaan keuangan belaka.

Maka program mencoba mengembangkan fokus kerja tambahan dengan titik tekan baru pada aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (perencanaan- pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan pengelolaan data-informasi-pengetahuan. Selain aspek manajemen tersebut, Penabulu juga mulai mengembangkan kompetensi dan portofolio pada upaya penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial.

Program melakukan intervensi melalui kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, in-house training, pendampingan dan konsultasi, pengembangan

literasi publik, pengembangan perangkat dan panduan, penyusunan video literasi dan tutorial, dan juga kemitraan dengan ataupun inisiasi lembaga penguatan kapasitas lokal.



TIK dan Pengelolaan

Perubahan lingkungan eksternal yang begitu cepat dan kental dengan pengaruh revolusi teknologi informasi, telah memberikan pesan perubahan yang kuat bagi seluruh organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah alat bagi perluasan jangkauan organisasi terhadap jaringan, komunitas dan konstituen; alat komunikasi efektif dengan sektor pemerintah dan sektor bisnis. TIK juga menjadi pendorong perbaikan tata kelola internal organisasi, sekaligus pengganda kekuatan sumber daya organisasi yang lain yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta data, informasi dan pengetahuan.

Penabulu meyakini bahwa penguasaan TIK dan pengelolaan pengetahuan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia kini telah menjadi syarat keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Keduanya akan menjadi faktor pembeda yang menentukan konstalasi baru organisasi masyarakat sipil Indonesia masa depan.

Pengelolaan pengetahuan akan menjamin pertumbuhan organisasi, menguatkan radar sensitivitas dan menguatkan daya ungkit sumber daya organisasi yang lainnya. Pengelolaan pengetahuan akan menysasar 3 dimensi organisasi yaitu dimensi obyek, agen dan konteks. Muara pengetahuan atau ingatan organisasi masyarakat sipil terbangun dari dua arus pengetahuan, yang masing-masing membutuhkan model pengelolaan

khusus: arus pengalaman akan dikelola menggunakan pendekatan budaya organisasi dan arus informasi akan dikelola menggunakan pendekatan sistemik.

Untuk membuat muara pengetahuan atau ingatan organisasi mampu menjamin pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi maka dibutuhkan spiralisasi dan konversi pengetahuan, yang dikelola dalam organisasi pembelajar. Terdapat tiga elemen utama pembentuk kondisi pemungkin pengelolaan pengetahuan pada organisasi pembelajar yaitu: budaya organisasi, sistem, dan satu elemen baru yaitu: teknologi, terutama TIK.

Program mendorong penggunaan TIK sebagai alat dan media komunikasi organisasi yang efektif dan efisien baik bagi penguatan internal organisasi maupun perluasan jaringan para pihak, sebagai basis pengembangan web yang akan membuka peluang interaksi dan penggalangan keterlibatan konstituen, donor dan masyarakat luas dan sebagai pilihan baru penggunaan aplikasi yang membantu operasi organisasi, mendorong terbangunnya pola kerja, pendekatan, program dan layanan baru.

Intervensi program dilakukan melalui kampanye, pelatihan intens dan terfokus, pendampingan dan konsultasi, riset, kajian, diskusi reguler dan pengembangan literasi terbuka, serta kolaborasi pengembangan platform, produk, perangkat dan panduan.

Rekam
Jejak 2020

Mempromosikan Inisiatif Ekonomi Hijau bagi Petani Perempuan dan Pemuda pada Sektor Pertanian Berkelanjutan di Indonesia (ECHO Green)	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat Secara Berkelanjutan di Laut Sawu	Penerapan Prinsip Pembangunan Keberlanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2021-2025 di 4 Kabupaten Anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari	Mengelola Risiko Melalui Pembangunan Ekonomi (MERD)
Small Grants Programme by the ASEAN Centre for Biodiversity	BesiBerani – Distribusi Berdampak Film “Pesantren”	Consultant Agency for Community Based Monitoring and Feedback (CBMF)	Hutan untuk Kesejahteraan (FOREST4DEV)
Peningkatan Ketangguhan Melalui Rantai Nilai yang Sensitif Nutrisi Cerdas dalam meniyasati Iklim dan Tangguh terhadap Bencana di Sulawesi Tengah	Penyebarluasan Praktik Efektif Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan dan Narasi Perubahan Iklim melalui Media Komunikasi Berbasis Masyarakat	Pengembangan Laporan Keterlibatan Masyarakat tentang Advokasi Anggaran	Organizational Effectiveness (OE) For Traction Energy Asia (TEA)
Dukungan bagi SGP ACB 1 IDN: Konsultan untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Mata Pencaharian Masyarakat	Responsible and Sustainable Business in Indonesia Palm Oil Plantation (RESBOUND), in Kalimantan Barat.	Kajian Mata Pencaharian Pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya	Institutional Capacity Building for Implementing Partners in 26 Priority Districts
The Inovation and Knowledge Hub (MADANI iHub)	The Challenge on Accelerating the “Desa Mandiri” Development in West Kalimantan	Civic Engagement Alliance (CEA).	

Portofolio selengkapnya, silakan kunjungi www.penabulufoundation.org

ISO 9001:2015

Sertifikat

REGISTRATION CERTIFICATE	
this is to certify that the management system of	
YAYASAN PENABULU - BADAN PELAKSANA MANAJEMEN HIBAH	
have been assessed by AJA EUROPE and registered against the requirements of	
ISO 9001:2015	
AJAEU/20/16492 <small>Certificate Number</small>	19th November 2020 <small>Date of Original Registration</small>
18th November 2023 <small>Expiry Date</small>	N/A <small>Date of Re-Registration</small>
 Alfonso Pagliuca, President & Founder, AJA Europe Ltd	
 0273	
	
<small>This certificate is issued in respect of the location & scope of registration detailed in the Associated Registration Schedule This certificate is the property of AJA Europe Ltd Unit 5 Middle Bridge Business Park Bristol Road Portishead Bristol BS20 6PN UK and must be returned on request.</small>	

REGISTRATION SCHEDULE		
scope of registration		
Grant Management Services		
YAYASAN PENABULU - BADAN PELAKSANA MANAJEMEN HIBAH		
<small>Company Name</small>		
Jalan Palapa II No. 4 Pasar Minggu 12520, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520, Indonesia		
<small>Sites Registered</small>		
39 <small>EAC</small>		AJAEU/20/16492 <small>Certificate Number</small>
19th November 2020 <small>Date Original Registration</small>	N/A <small>Date Of Re-registration</small>	18th November 2023 <small>Expiry Date</small>
18th September 2023 <small>Next Re-Audit Due Date</small>	N/A <small>Revision Date</small>	N/A <small>Previous Expiry Date</small>
 Alfonso Pagliuca, President & Founder, AJA Europe Ltd		
 0273		
<small>This certificate is the property of AJA Europe Ltd Unit 5 Middle Bridge Business Park Bristol Road Portishead Bristol BS20 6PN UK and must be returned on request.</small>		

